

PENGUATAN KELEMBAGAAN BUMDES UNTUK PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN RANCAKALONG

STRENGTHENING BUMDES INSTITUTIONS FOR VILLAGE DEVELOPMENT IN RANCAKALONG SUBDISTRICT

¹Iwan Kurniawan*, ²Melati Dewi Asri, ³Laksmi Fitriani, ⁴Ramdani Priatna

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Bandung

⁴Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail: ¹iwan.kurniawan@poltek.stialanbandung.ac.id; ²melati.dewi@poltek.stialanbandung.ac.id;

³laksmi.fitriani@poltek.stialanbandung.ac.id; ⁴ramdanipriatna@poltek.stialanbandung.ac.id

Informasi Artikel: (Diterima 20/12/2023; Revisi 21/12/2023)

ABSTRAK

Pembentukan BUMDes adalah langkah untuk memberdayakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut harus ditunjang dengan pengelolaan yang baik sehingga potensi-potensi di desa yang memiliki nilai ekonomi dapat dikembangkan secara masif guna mensejahterahkan masyarakat desa. Namun, pengelolaan BUMDes tidak mudah pada proses pelaksanaannya dan memerlukan penguatan dari sisi kelembagaannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk membantu pengelolaan BUMDes menjadi lebih baik untuk pembangunan desa. Pelaksanaan PkM ini berupa workshop dan kunjungan beberapa BUMDes di Kecamatan Rancakalong. Kecamatan Rancakalong memiliki 10 desa dan setiap desa memiliki BUMDes. Hasil kegiatan PkM dapat diperoleh bahwa para pengelola BUMDes mengetahui pengelolaan BUMDes bukan didasarkan oleh keinginan para pemimpin desa tetapi atas musyawarah desa guna memberikan kesejahteraan untuk masyarakat khususnya perekonomian desa, menggali potensi desa harus berdasarkan data yang terhimpun dalam sebuah sistem, dan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes yang lebih profesional. Oleh karena itu, penguatan BUMDes harus dilakukan secara berkala dan terstruktur untuk kemajuan BUMDes itu sendiri.

Kata kunci—
BUMDes,
Kelembagaan,
Pembangunan

*Keywords—BUMDes,
Institutions,
Development*

ABSTRACT

The formation of BUMDes is a step to empower the economy and welfare of village communities. This must be supported by good management so that the potential in the village which has economic value can be developed massively in order to improve the welfare of the village community. However, managing BUMDes is not easy in the implementation process and requires strengthening from the institutional side. This community service (PkM) activity aims to help better manage BUMDes for village development. The implementation of this PkM took the form of a workshop and visits to several BUMDes in Rancakalong Subdistrict. Rancakalong Subdistrict has 10 villages and each village has a BUMDes. The results of PkM activities can be obtained that BUMDes managers know that BUMDes management is not based on the wishes of village leaders but on village deliberations to provide welfare for the community, especially the village economy, exploring village potential

must be based on data collected in a system, and increasing capacity for BUMDes managers. a more professional one. Therefore, strengthening BUMDes must be carried out periodically and in a structured manner for the progress of BUMDes itself.

1. PENDAHULUAN

Desa yang menjadi wilayah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara merata, harus mampu menjadi penggerak ekonomi selain kota yaitu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan amanah undang-undang yang diberikan kepada pemerintah desa, terutama untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa (Saniyah, 2019). Berdirinya BUMDes didasarkan oleh UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa” (Undang-Undang No 32, 2004).

Pendirian BUMDes memerlukan komitmen yang serius dari berbagai pihak pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, BUMDes memerlukan adanya penguatan kapasitas dan dukungan dengan memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan usaha warga desa dari persaingan ekonomi yang masif. BUMDes harus menjadi tiang kegiatan perekonomian desa yang memiliki dua fungsi yaitu sosial dan bisnis. BUMDes sebagai fungsi sosial yaitu berpihak kepada kepentingan warga desa melalui pengadaan layanan sosial yang dibutuhkan masyarakat dan sebagai fungsi bisnis yaitu mencari keuntungan melalui berbagai keperluan akan kebutuhan barang dan jasa. Berkenaan dengan pentingnya keberadaan BUMDes di setiap perdesaan, maka setiap desa wajib mendirikan BUMDes.

Setelah pendirian BUMDes ini, beberapa masalah yang sering muncul menurut Permatasari (2020) dilatarbelakangi oleh beberapa keadaan dan faktor yaitu:

1. Pendirian BUMDes tidak selaras dengan regulasi yang berlaku dimana BUMDes ada karena keinginan dari pimpinan pemerintah desa dan bukan hasil musyawarah masyarakat sehingga pengurus BUMDes merangkap sebagai aparatur desa.
2. BUMDes mengalami kekurangan modal. Beberapa kepala desa yang tidak mau membantu dalam penyertaan modal kepada BUMDes walaupun sudah diterangkan dalam peraturan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi terkait prioritas penggunaan dana desa.
3. Pembentukan BUMDes tidak disahkan melalui peraturan desa
4. Dukungan dari masyarakat sekitar dan kepala desa yang kurang untuk kemajuan BUMDes
5. Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes yang belum mumpuni dan ahli

Hal ini dikuatkan dengan beberapa survei pendahuluan terkait BUMDes dengan menggunakan angket (google form) pada pengabdian sebelumnya yaitu pengelolaan BUMDes yang belum maksimal terkait dukungan dari pemangku kepentingan baik secara materiil dan non materiil serta para pengelola BUMDes yang belum terampil di bidangnya sehingga memerlukan penguatan dan pengembangan BUMDes itu sendiri.

Pengembangan lembaga BUMDes berfungsi sebagai katalisator ekonomi masyarakat desa terutama desa-desa di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Hal ini sesuai dengan unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, masyarakat dapat menggerakkan ekonomi dan memberikan lapangan kerja bagi orang-orang usia produktif. Mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa adalah salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa. Pengembangan potensi desa menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas desa untuk mengubah kondisi sosial ekonomi perdesaan, hal ini menjadi cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan gerakan desa ini dapat dimulai dengan pembentukan, penguatan, dan pengembangan BUMDes sehingga dapat mengurangi pengangguran dan tingkat urbanisasi. Hal tersebut mirip dengan pernyataan Kartasmita (1997) menyatakan bahwa pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah

banyak dikenal dewasa ini, seperti memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah SDM, Kelembagaan BUMDes itu sendiri dan pengembangan usaha. Hal tersebut didasarkan setelah melakukan diskusi dengan Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sumedang. Pengembangan BUMDes memang bukan tanggung jawab pemerintah desa saja tetapi semua yang terlibat yaitu masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan media (Santosa et al., 2023). Kelima hal ini dikenal dengan sebutan *penta-helix*.



Gambar 1. Komponen *Penta-Helix*

Kolaborasi pentahelix sendiri didefinisikan sebagai kerja sama antar lini di akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan, dan media. Akademisi menyediakan ide dan teori terkini untuk sumber pengetahuan. Swasta dan bisnis menawarkan infrastruktur teknologi dan modal. Komunitas berfungsi sebagai mediator dan perantara antara pihak-pihak yang berkepentingan. BUMDes dikembangkan oleh pemerintah, dan media mendukung publikasi mereka dan mempromosikan *branding* mereka (Rahu, 2021)

Sebagai akademisi yang ingin ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan BUMDes di Kecamatan Rancakalong perlu dilaksanakan dengan melihat berbagai potensi yang ada. Beberapa pengabdian sebelumnya mengenai pengelolaan BUMDes yaitu hasil pengabdian kepada masyarakat “Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUMDes: BUMDes Akuntabel, Masyarakat Sejahtera” menunjukkan bahwa 30% BUMDes di Kecamatan Rancakalong belum memiliki tata kelola yang baik sehingga perlu didukung penuh oleh para stakeholder terkait untuk mengupayakan BUMDes yang lebih akuntabel dan profesional. Dengan pengabdian ini harapannya para pengelola BUMDes mampu memetakan kendala yang dihadapi oleh BUMDes dalam hal Penguatan Kelembagaan BUMDes Untuk Pembangunan Desa Yang Lebih Baik.



Gambar 2. Spanduk Kegiatan PkM

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis yaitu berbagi pengetahuan secara akademik dan pengalaman di lapangan. Kegiatan bimbingan teknis ini terdiri dari pemaparan materi dari narasumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Praktisi Forum BUMDes Kabupaten Sumedang, Politeknik STIA LAN Bandung dan dihadiri oleh pengelola BUMDes, aparatur desa, dan warga dari setiap desa. Persiapan yang dilakukan pertama kali adalah mengirimkan undangan yang dikirimkan oleh pihak kecamatan dan Politeknik STIA LAN Bandung kepada narasumber dan pengelola BUMDes serta perwakilan aparatur dan warga desa yang menjadi sasaran dari kegiatan PkM ini. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan selama tiga hari (24 – 26 Oktober 2023) di Kantor Kecamatan Rancakalong. Adapun *rundown* kegiatan yang telah disusun secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan

Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
Hari ke-1 (24 Oktober 2023)	1. Kedatangan di lokasi kegiatan PkM 2. Sosialisasi keseluruhan kegiatan PkM 3. Setting lokasi kegiatan PkM
Hari ke-2 (25 Oktober 2023)	1. Pembukaan kegiatan PkM dan sambutan-sambutan 2. Penyampaian materi dari tiga narasumber
Hari ke-3 (26 Oktober 2023)	1. Kunjungan ke salah satu BUMDes 2. Diskusi dengan pengelola BUMDes

Pengisi atau narasumber pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 2. Narasumber PkM

Narasumber	Instansi	Materi
Narasumber 1:	Kabid pemberdayaan ekonomi, pembangunan dan kerjasama desa – Dinas PMD Kab. Sumedang)	Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa
Narasumber 2:	Ketua Forum BUMDes Kabupaten Sumedang	Peluang dan Tantangan BUMDesa
Narasumber 3:	Dosen Politeknik STIA LAN Bandung	Strategi Penguatan Kelembagaan BUMDes dengan Potensi Desa di Kecamatan Rancakalong

Target peserta dari kegiatan PkM ini minimal berjumlah 30 orang yang terdiri dari pengelola BUMDes, aparatur desa, dan warga dari setiap desa. Peserta diharapkan mampu menerapkan materi dari narasumber dan mengevaluasi terhadap pengelolaan yang sudah dilaksanakan selama ini. Tim pengabdian kepada

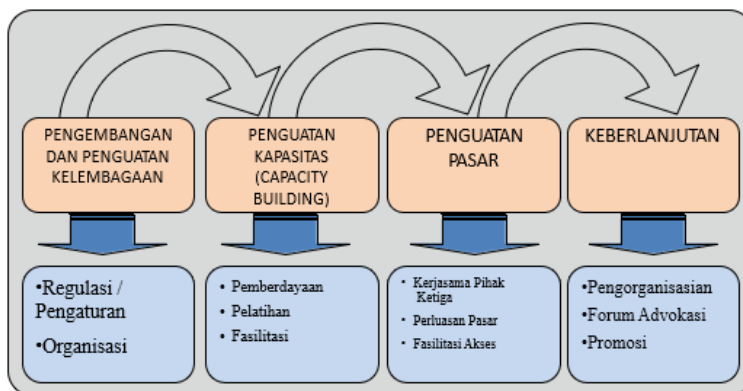
masyarakat dari Politeknik STIA LAN Bandung terdiri dari 4 orang yang sudah terbagi dalam tugas agar kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap desa yang ada di penjuru negeri Indonesia ini memiliki potensi sumber daya yang melimpah baik itu sumber daya alam atau manusia. Hal ini dapat dilihat pada IPD (Indeks Potensi Desa). Hasil pengklasteran IPD menunjukkan bahwa desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19.17%), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73.40%), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7.43%) (BPS, 2018). Untuk itu, hal yang paling utama untuk dilakukan adalah mengidentifikasi potensi desa sehingga dapat menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan bersama BUMDes. Dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan BUMDes, yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan desa melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi desa (Andriyani, 2020). Pengidentifikasian potensi desa dapat dilakukan secara bersama melalui pemerintah desa dan masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes itu sendiri.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Seluruh pihak berwenang yang hadir, terdiri dari aparatur desa, pengelola BUMDes, dan warga desa sangat antusias dengan keberhasilan program pengabdian masyarakat ini. Beberapa hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Bumdes dan aparatur desa telah menyadari bahwa mengetahui tugas masing-masing BUMDes sangat penting untuk meningkatkan ekonomi desa. Karena seringkali terjadi dualisme pekerjaan karena tidak adanya beban kerja yang jelas di setiap organisasi pemerintah desa,
2. Pengurus BUMDes dan pemerintah desa berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan sesuai dengan regulasi dan ketentuan pelaksanaan BUMDes dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan layanan masyarakat.



Gambar 3. Tahapan Pengembangan BUMDes

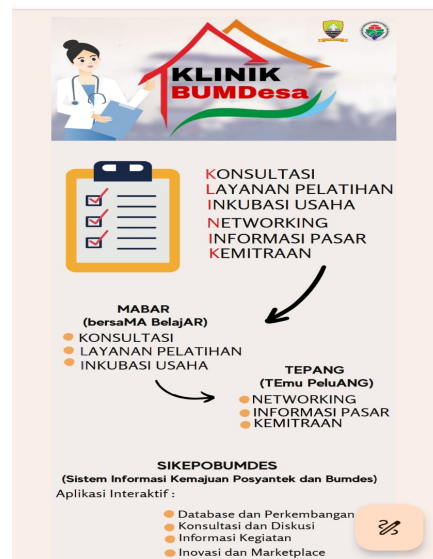
Seperti pada gambar 2 bahwa untuk pengembangan kelembagaan BUMDes diperlukan pembinaan yang dirumuskan dalam beberapa bentuk strategi, yaitu diantaranya:

1. Status badan hukum dan masyarakat BUM Desa/BUM Desa bersama harus diperkuat;
2. Manajemen dan organ BUMDes itu sendiri harus diperkuat;
3. Usaha dan Unit Usaha BUMDes bersama harus diperkuat;
4. Kerja sama dan kemitraan harus diperkuat;
5. Pengelolaan aset dan permodalan harus diperkuat;
6. Pelaporan dan akuntabilitas harus diperbaiki dan ditingkatkan; dan
7. Organisasi BUMDes bersama masyarakat harus diperkuat sehingga dapat memberikan profit dan manfaat.

Dari strategi diatas diwujudkan pada program kegiatan pengembangan BUMDes diantaranya:

- pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan bisnis;
- forum komunikasi komunitas secara teratur dan berkesinambungan;
- penyelenggaraan temu usaha, seperti seminar dan kunjungan usaha, secara teratur dan berkesinambungan;
- fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan;
- memfasilitasi akses BUMDes ke sumber informasi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
- mendorong dan meningkatkan akses BUMDes bersama ke sumber informasi bisnis;
- mendukung promosi produk, termasuk penyediaan infrastruktur untuk promosi;
- mendukung pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi serta perluasan jangkauan pemasaran;
- mengadakan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital;
- program dan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan persyaratan BUMDes.

Selain pembinaan yang berkelanjutan, BUMDes memiliki klinik untuk tempat konsultasi mengenai pengelolaan BUMDes itu sendiri. Klinik BUMDes terbagi menjadi dua program utama yaitu MABAR (bersaMA BelajAR) dan TEPANG (Temu PeluANG). MABAR memiliki tiga kegiatan yaitu konsultasi, layanan pelatihan, dan inkubasi usaha sedangkan TEPANG memiliki tiga kegiatan yaitu Networking, Informasi Pasar, dan Kemitraan

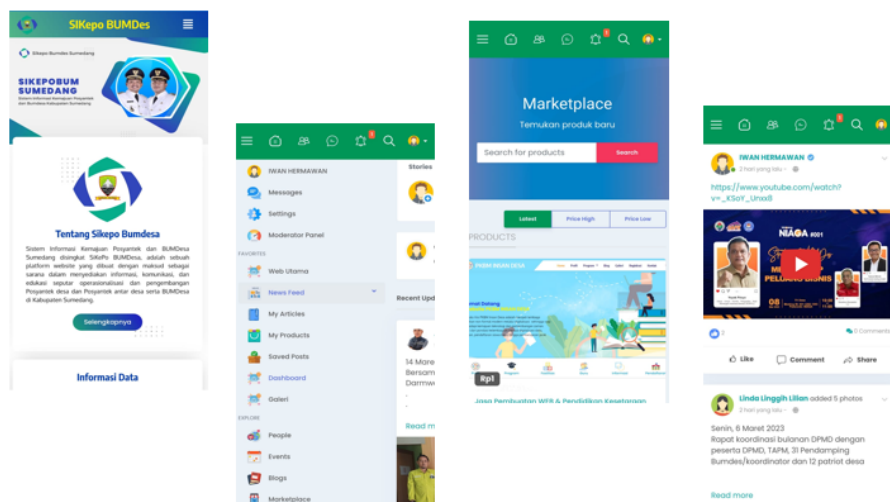


Gambar 4. Klinik BUMDes

Untuk memenuhi tuntutan kemajuan teknologi, BUMDes memiliki sistem informasi yang bernama SIKEPOBUMDES (Sistem Informasi Kemajuan Posyantek dan Bumdes). SIKEPOBUMDES memiliki aplikasi interaktif yaitu diantaranya:

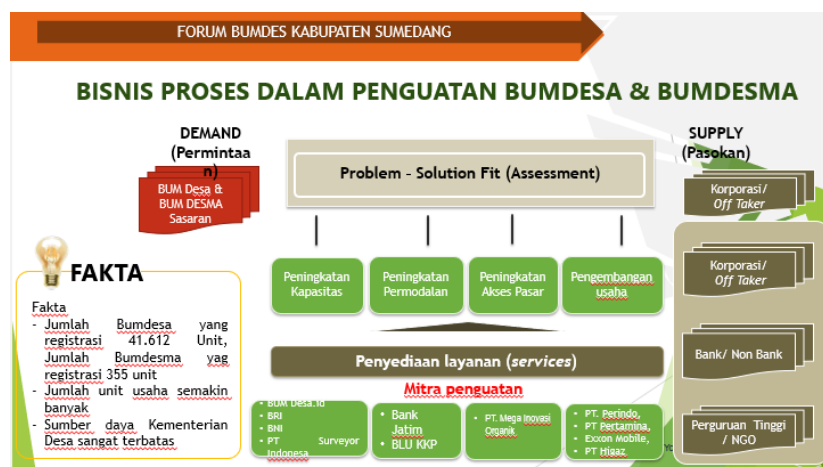
- Database dan Perkembangan: penggunaan aplikasi yang menunjukkan kumpulan data mengenai BUMDes berikut dengan pembaharuan atau perkembangan data yang masuk secara *realtime*.
- Konsultasi dan Diskusi: penggunaan aplikasi untuk berdiskusi menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di BUMDes.
- Informasi Kegiatan: sarana aplikasi untuk berbagi informasi kegiatan BUMDes.

- d. Inovasi dan Marketplace: penggunaan aplikasi untuk mengetahui inovasi yang sudah dilakukan oleh BUMDes dan sarana pemasaran produk-produk BUMDes.



Gambar 5. SIKEPOBUMDES

Penting untuk diketahui bahwa pengelola BUMDes dapat memahami bisnis proses dalam penguatan kelembagaan yaitu mengenai *demand* dan *supply* yang harus jelas kepada para pelaku usaha lainnya karena perlu untuk kolaborasi dengan badan usaha lainnya. Jika hal ini dapat berjalan secara berkesinambungan maka akan terjalin mitra penguatan BUMDes untuk penyediaan layanan kepada masyarakat desa. Penyediaan layanan tidak akan luput dengan permasalahan seperti peningkatan kapasitas, permodalan, akses pasar, dan pengembangan usaha.



Gambar 6. Bisnis Proses BUMDes

Segala permasalahan tentunya ada alternatif/solusi untuk menyelesaikannya dengan berbagai sudut pandang. Langkah-langkah penyelesaian permasalahan harus dipikirkan secara sistematis dengan melihat berbagai faktor internal dan eksternal yang ada dalam BUMDes itu sendiri. Ketika faktor internal dan eksternal ini dapat diuraikan ke dalam sebuah rumusan masalah yang harus ditindaklanjuti maka pemetaan masalah menjadi jelas dan terstruktur. Pemetaan masalah penguatan kelembagaan BUMDes perlu dilakukan untuk melihat prioritas alternatif/penyelesaian yang segera ditindaklanjuti. Tabel berikut akan membantu penguatan kelembagaan BUMDes itu sendiri agar lebih terukur untuk mencari alternatif dengan menggunakan SWOT:

Tabel 3. Penguatan BUMDes dengan SWOT

No	Komponen SWOT	Identifikasi
1	Kekuatan	• Apa sajakah produk unggulan BUMDes? • Apa yang menjadi keunggulan BUMDes yang lebih baik dari BUMDes lainnya? • Apa potensi desa yang unik pada pemanfaatan sumber daya dengan biaya terendah yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDes sementara yang lain tidak bisa? • Apa yang dapat digali dari konsumen/masyarakat sebagai kekuatan BUMDes? • Faktor-faktor yang membuat BUMDes mendapatkan profit? • Apa yang menjadi nilai kekhasan dari organisasi BUMDes?
2	Kelemahan	• Apa yang dapat ditindaklanjuti oleh pengelola BUMDes dari kelemahan-kelemahan yang ada? • Apa yang harus dihindari oleh BUMDes untuk kelemahan-kelemahan yang terjadi? • Apa yang dilihat oleh konsumen/atau masyarakat yang cenderung sebagai kelemahan BUMDes? • Faktor-faktor apa saja menyebabkan BUMDes kehilangan profit?
3	Peluang	• Apa kesempatan baik yang bisa dilihat oleh BUMDes sebagai peluang ekonomi di desa? • Apakah BUMDes menganalisis trend yang menarik untuk dijadikan peluang bisnis di desa?
4	Ancaman	• Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh BUMDes? • Inovasi apa yang dilakukan oleh pesaing BUMDes? • Apa sajakah yang menjadi indikator kualitas atau kriteria pekerjaan, produk, atau jasa BUMDes berubah terhadap tantangan yang ada? • Apakah adanya disrupsi digital mengancam posisi BUMDes? • Apakah BUMDes memiliki masalah hutang atau arus kas?

Alternatif/penyelesaian itu bisa dirumuskan dan disosialisasikan bersama pemerintah dan masyarakat desa maka langkah selanjutnya dari penguatan kelembagaan yaitu pengembangan potensi usaha melalui BUMDes. Pengembangan potensi usaha memerlukan ahli di bidangnya. Untuk itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang berpengalaman perlu dilakukan agar pengembangan usaha BUMDes ini berjalan optimal. Berikut ini adalah beberapa jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh mayoritas yang ada di desa-desa di Indonesia yang dapat diadopsi oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Rancakalong

sesuai arahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa:

Tabel 4. Jenis Usaha BUMDes (Permendes PDTT Nomor 4, 2015)

No.	Jenis Usaha/Bisnis	Contoh
1	Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana : “memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial” (Pasal 19)	a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2	Bisnis Penyewaan (Renting) Barang: “untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.” (Pasal 20)	a. alat transportasi; b. perkakas pesta; c. gedung pertemuan; d. rumah toko; e. tanah milik BUM Desa; dan f. barang sewaan lainnya.
3	Usaha Perantara (Brokering): “yang memberikan jasa pelayanan kepada warga” (Pasal 21)	a. jasa pembayaran listrik; b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan c. jasa pelayanan lainnya.
4	Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading): “barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas” (Pasal 22)	a. pabrik es; b. pabrik asap cair; c. hasil pertanian; d. sarana produksi pertanian; e. sumur bekas tambang; dan f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
5	Bisnis Keuangan (Financial Business): yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa (Pasal 23)	Memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa
6	Usaha Bersama (Holding): sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24)	a. dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. b. dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: 1. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; 2. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan 3. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

4. KESIMPULAN

Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di Kecamatan Rancakalong sebagai penguatan kelembagaan ekonomi desa :

- a. Badan usaha milik desa Kecamatan Rancakalong ini telah dibentuk sesuai dengan peraturan desa yang ada dimulai dengan dasar hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan struktur organisasi.
- b. Cara penyaluran dan pemanfaatan dana ke BUMDes ini jelas dengan dana awal yang dimiliki BUMDes ini berasal dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa kepada badan usaha milik desa yang ingin memberikan pinjaman modal.
- c. Usaha dan pengembangan di BUMDes ini bervariasi, tetapi pada proses berjalannya waktu ada yang berhenti dan tetap bertahan.
- d. Di dalam badan usaha milik desa ini, masalah permodalan sangat sensitif sehingga pengelola BUMDes harus transparan dan akuntabel dalam penyertaan modal.

Kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa:

- a. Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh badan usaha milik desa masih belum optimal sehingga belum memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Namun, beberapa BUMDes sudah ada yang berhasil terkait kontribusi pendapatan desa. Oleh karena itu, saling gotong royong dan sharing ilmu pengetahuan dapat dijadikan alternatif bagi BUMDes di Kecamatan Rancakalong.
- b. Meskipun badan usaha milik desa ini masih ada yang belum memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya BUMDes karena berbagai upaya yang dilakukan pengelolanya.

5. SARAN

Adapun saran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu penguatan kelembagaan BUMDes secara berkelanjutan terutama sumber daya manusia sebagai pengelola BUMDes di lingkungan pemerintah desa di Kecamatan Rancakalong khususnya aparat desa dalam menjalankan beban kerjanya sesuai dengan tupoksinya;
2. Memperbanyak pelatihan-pelatihan dan sosialisasi tentang optimalisasi komitmen aparatur desa dalam menjalankan tupoksi terkait pengelolaan BUMDes;
3. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama kegiatan ekonomi desa yang dinaungi oleh BUMDes untuk kemajuan desa-desa di Kecamatan Rancakalong.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, F. (2020). Pengelolaan potensi desa oleh Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur: Management of village potentials by Village-Owned Company of North Sangatta Village, Kutai Timur District. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 31–41.
- BPS. (2018). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*.
- Undang-Undang No 32, Pub. L. No. 32 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Permendes PDTT Nomor 4, Pub. L. No. 4 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150440/permendes-pdtt-no-4-tahun-2015>
- Kartasasmita, G. (1997). *Kemiskinan*. Balai Pustaka.
- Permatasari, A. G. (2020). Eksistensi Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 40–49.
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24.

- Saniyah, S. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Santosa, A., Fadilla, S., Kuncoro, S., Ulfa, C. K., Priyanto, A., Juliana, A., Nurqamarani, A. S., Thaha, A. R., Saraswati, R. D., & Salsabila, L. (2023). PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN STRATEGI BISNIS BUMDES CITAYAM SEJAHTERA KABUPATEN BOGOR. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 10114–10119.